

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMK N 1 Seyegan
 Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia (wajib)
 Kelas / semester : XI / Gasal
 Materi Pokok : Antara Kolonialisme Dan Imperialisme
 Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (1 pertemuan)

- KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 KI 3 : Memahami, menerapkan, mengaalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
 KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

A. KOMPETENSI DASAR dan INDIKATOR

| No. | Kompetensi Dasar | Indikator |
|-----|--|--|
| 1.3 | Menghayati jati diri manusia sebagai <i>agent of changes</i> di bumi dengan cara menata lingkungan yang baik guna memenuhi kesejahteraan lahir bathin. | 1.3.1 Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa; |
| | | 1.3.2 Mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri. |
| | | 1.3.3 Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan masyarakat |
| | | 1.3.4 Memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa |
| | | 1.3.5 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa Indonesia. |
| | | 1.3.6 Menghormati orang lain dalam menjalankan ibadah sesuaidengan agamanya. |
| | | 1.3.7 Terus berkreasi dan berinovasi demi kemajuan bangsa. |
| 2.2 | Meneladani sikap dan tindakan cinta | 2.2.1 Melaksanakan tugas individu dengan baik. |

| | | |
|-----|--|---|
| | damai, responsif dan pro aktif yang ditunjukkan oleh tokoh sejarah dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungannya. | 2.2.2 Cepat tanggap dalam merespon suatu kejadian. 2.2.3 Tidak menyalahkan/menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat. 2.2.4 Mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. 2.2.5 Bersikap jujur. 2.2.6 Tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan tindakan kita sendiri. 2.2.7 Melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa disuruh/ diminta. 2.2.8 Mewujudkan sikap saling tolong-menolong dalam kehidupan. |
| 3.3 | Menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Barat di Indonesia. | 3.3.1 Menjelaskan proses kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. 3.3.2 Menjelaskan dampak imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia. |
| 4.2 | Mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Barat di Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. | 4.2.1 Membuat tulisan berisi analisis mengenai awal mula penjajahan bangsa Barat di Indonesia. 4.2.2 Membuat tulisan berisi analisis tentang awal mula penjajahan bangsa Barat di Indonesia. |

B. **TUJUAN PEMBELAJARAN**

- a. Peserta didik dapat menjelaskan pelaksanaan dan dampak dari kebijakan Jalan Tengah.
- b. Peserta didik dapat menganalisis penerapan dan dampak dari Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*).
- c. Peserta didik dapat menjelaskan pelaksanaan dan dampak dari sistem Usaha Swasta.

C. **MATERI PEMBELAJARAN**

4. **Dominasi Pemerintah Kolonial Belanda**

Thomas Stamford Raffles menyerahkan jabatannya pada tahun 1816, dan seorang bernama John Fendall sudah ditunjuk untuk menggantikan Raffles. Namun dalam konvensi London yang diadakan pada 1814, terdapat satu pernyataan yang menyebutkan bahwa wilayah Hindia Belanda harus dikembalikan kepada Belanda. Dengan demikian, Nusantara kembali menjadi berada di bawah jajahan Belanda.

a. Jalan Tengah Bersama Komisaris Jenderal

Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran Willem VI yang terdiri atas tiga orang, yakni: Cornelis Theodorus Elout (ketua), Arnold Ardiaan Buyskes (anggota), dan Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen (anggota). Sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan di negeri jajahan Pangeran Willem VI mengeluarkan Undang-Undang Pemerintah untuk negeri jajahan (Regerings Reglement) pada tahun 1815. Salah satu pasal dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. Hal ini menunjukkan bahwa ada

relevansi dengan keinginan kaum liberal sebagaimana diusulkan oleh Dirk van Hogendorp.

Berbekal ketentuan dalam undang-undang tersebut ketiga anggota Komisaris Jenderal itu berangkat ke Hindia Belanda. Ketiganya sepakat untuk mengadopsi beberapa kebijakan yang pernah diterapkan oleh Raffles. Mereka sampai di Batavia pada 27 April 1816. Ketika melihat kenyataan di lapangan, Ketiga Komisaris Jenderal ituimbang untuk menerapkan prinsip-prinsip liberalisme dalam mengelola tanah jajahan di Nusantara. Hindia dalam keadaan terus merosot dan pemerintah mengalami kerugian. Kas negara Belanda dalam keadaan menipis. Mereka sadar bahwa tugas mereka harus dilaksanakan secepatnya untuk dapat mengatasi persoalan ekonomi baik di Tanah Jajahan maupun di Negeri Induk. Sementara itu perdebatan antar kaum liberal dan kaum konservatif terkait dengan pengelolaan tanah jajahan untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya belum mencapai titik temu. Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan keuntungan yang besar bila diserahkan kepada swasta, dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam. Sedang kelompok konservatif berpendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan apabila langsung ditangani pemerintah dengan pengawasan yang ketat.

Dengan mempertimbangkan amanat UU Pemerintah dan melihat kenyataan di lapangan serta memperhatikan kaum liberal dan kaum konservatif, Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan jalan tengah. Maksudnya, eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, di samping mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan. Tetapi kebijakan jalan tengah ini tidak dapat mengubah keadaan. Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1818 Pemerintah memberlakukan UU yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah gubernur jenderal. Van der Capellen kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal. Ia ingin melanjutkan strategi jalan tengah. Tetapi kebijakan Van der Capellen itu berkembang ke arah sewa tanah dengan menghapus peran penguasa tradisional (bupati dan para penguasa setempat). Kemudian Van der Capellen juga menarik pajak tetap yang sangat memberatkan rakyat. Timbul banyak protes dan mendorong terjadinya perlawanan. Kemudian ia dipanggil pulang dan digantikan oleh Du Bus Gisignies. Ia berkeinginan membangun modal dan meningkatkan ekspor. Tetapi program ini tidak berhasil karena rakyat tetap miskin sehingga tidak mampu menyediakan barang-barang yang diekspor. Yang terjadi justru impor lebih besar dibanding ekspor. Tentu ini sangat merugikan bagi pemerintah Belanda. Kondisi tanah jajahan dalam kondisi krisis, kas negara di negeri induk pun kosong. Hal ini disebabkan dana banyak tersedot untuk pembiayaan perang di tanah jajahan. Sebagai contoh Perang Diponegoro yang baru berjalan satu tahun sudah menguras dana yang luar biasa, sehingga pemerintahan Hindia Belanda dan pemerintah negeri induk mengalami kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi Belanda ini semakin diperberat dengan adanya pemisahan antara Belanda dan Belgia pada tahun 1830. Dengan pemisahan ini Belanda banyak kehilangan lahan industri sehingga pemasukan negara juga semakin berkurang.

b. Sistem Tanam Paksa

Pemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi masalah ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat. Salah satunya pada tahun 1829 seorang tokoh bernama Johannes Van den Bosch mengajukan kepada raja Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi, di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, maka penanaman dilakukan dengan paksa. Mereka menggunakan konsep daerah jajahan sebagai tempat

mengambil keuntungan bagi negeri induk. Seperti dikatakan Baud, Jawa adalah “gabus tempat Nederland mengapung”. Jadi dengan kata lain Jawa dipandang sebagai sapi perahan.

Konsep Bosch itulah yang kemudian dikenal dengan *Cultuurstelsel* (Tanam Paksa). Dengan cara ini diharapkan perekonomian Belanda dapat dengan cepat pulih dan semakin meningkat. Bahkan dalam salah satu tulisan Van den Bosch membuat suatu perkiraan bahwa dengan Tanam Paksa, hasil tanaman ekspor dapat ditingkatkan sebanyak kurang lebih f.15. sampai f.20 juta setiap tahun. Van den Bosch menyatakan bahwa cara paksaan seperti yang pernah dilakukan VOC adalah cara yang terbaik untuk memperoleh tanaman ekspor untuk pasaran Eropa. Dengan membawa dan memperdagangkan hasil tanaman sebanyak-banyaknya ke Eropa, maka akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar.

1) Ketentuan Tanam Paksa

Raja Willem tertarik serta setuju dengan usulan dan perkiraan Van den Bosch tersebut. Tahun 1830 Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa. Setelah sampai di Jawa Van den Bosch segera mencanangkan sistem dan program Tanam Paksa. Secara umum Tanam Paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis tanaman itu di samping kopi juga antara lain tembakau, tebu, dan nila. Rakyat kemudian diwajibkan membayar pajak dalam bentuk barang sesuai dengan hasil tanaman yang ditanam petani. Secara rinci beberapa ketentuan Tanam Paksa itu termuat pada Lembaran Negara (*Staatsblad*) Tahun 1834 No. 22. Ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut.

- a) Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan Tanam Paksa.
- b) Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan Tanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
- c) Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Tanam Paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
- d) Tanah yang disediakan untuk tanaman Tanam Paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
- e) Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat.
- f) Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani, menjadi tanggungan pemerintah.
- g) Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedang pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum.
- h) Penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun. Menurut apa yang tertulis di dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tampaknya tidak terlalu memberatkan rakyat. Bahkan pada prinsipnya rakyat boleh mengajukan keberatan-keberatan apabila memang tidak dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ini artinya ketentuan Tanam Paksa itu masih memperhatikan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.

2) Pelaksanaan Tanam Paksa

Menurut Van den Bosch, pelaksanaan sistem Tanam Paksa harus menggunakan organisasi desa. Oleh karena itu, diperlukan faktor penggerak, yakni lembaga organisasi dan tradisi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Berkaitan dengan itu pengerahan tenaga kerja melalui kegiatan seperti sambatan, gotong royong maupun

gugur gunung, merupakan usaha yang tepat untuk dilaksanakan. Dalam hal ini peran kepala desa sangat sentral. Kepala desa di samping sebagai penggerak para petani, juga sebagai penghubung dengan atasan dan pejabat pemerintah. Oleh karena posisi yang begitu penting itu maka kepala desa tetap berada di bawah pengaruh dan pengawasan para pamong praja.

Dalam pelaksanaannya sistem Tanam Paksa tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Hal ini telah mendorong terjadinya tindak korupsi dari para pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa. Tanam Paksa telah membawa penderitaan rakyat. Banyak pekerja yang jatuh sakit. Mereka dipaksa fokus bekerja untuk Tanam Paksa, sehingga nasib diri sendiri dan keluarganya tidak terurus. Bahkan kemudian timbul bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah. Misalnya di Cirebon (1843 - 1844), di Demak (tahun 1849) dan Grobogan pada tahun 1850.

Sementara itu dengan pelaksanaan Tanam Paksa ini Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia. Dari tahun 1831 hingga tahun 1877 perbendaharaan kerajaan Belanda telah mencapai 832 juta gulden, utang-utang lama VOC dapat dilunasi, kubu-kubu dan benteng pertahanan dibangun. Belanda menikmati keuntungan di atas penderitaan sesama manusia. Memang harus diakui beberapa manfaat adanya Tanam Paksa, misalnya, dikenalkannya beberapa jenis tanaman baru yang menjadi tanaman ekspor, dibangunnya berbagai saluran irigasi, dan juga dibangunnya jaringan rel kereta api. Beberapa hal ini sangat berarti dalam kehidupan masyarakat kelak.

c. Sistem Usaha Swasta

Pelaksanaan Tanam Paksa memang telah berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Kemakmuran juga semakin meningkat. Bahkan keuntungan dari Tanam Paksa telah mendorong Belanda berkembang sebagai negara industri. Sejalan dengan hal ini telah mendorong pula tampilnya kaum liberal yang didukung oleh para pengusaha. Oleh karena itu, mulai muncul perdebatan tentang pelaksanaan Tanam Paksa. Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik buruk dan untung ruginya Tanam Paksa. Timbullah pro dan kontra mengenai pelaksanaan Tanam Paksa.

Pihak yang pro dan setuju Tanam Paksa tetap dilaksanakan adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah. Mereka setuju karena Tanam Paksa telah mendatangkan banyak keuntungan. Begitu juga para pemegang saham perusahaan NHM (*Nederlansche Handel Matschappij*), yang mendukung pelaksanaan Tanam Paksa karena mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil-hasil Tanam Paksa dari Hindia Belanda ke Eropa. Sementara, pihak yang menentang pelaksanaan Tanam Paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi. Mereka umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta.

Nederlansche Handel Matschappij merupakan perusahaan dagang yang didirikan oleh Raja William I di Den Haag pada 9 Maret 1824. Berbagai promosi dalam usahanya mencakup bidang perdagangan dan perusahaan pengiriman, dan memegang peran penting dalam mengembangkan perdagangan Belanda-Indonesia.

Pandangan dan ajaran kaum liberal itu semakin berkembang dan pengaruhnya semakin kuat. Oleh karena itu, tahun 1850 Pemerintah mulai bimbang. Apalagi setelah kaum liberal mendapatkan kemenangan politik di Parlemen (Staten Generaal). Parlemen memiliki peranan lebih besar dalam urusan tanah jajahan. Sesuai dengan asas liberalisme, maka kaum liberal menuntut adanya perubahan dan pembaruan. Peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dikurangi, sebaliknya perlu diberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi. Pemerintah

berperan sebagai pelindung warga, mengatur tegaknya hukum, dan membangun sarana prasarana agar semua aktivitas masyarakat berjalan lancar. Pandangan dan ajaran kaum liberal itu semakin berkembang dan pengaruhnya semakin kuat. Oleh karena itu, tahun 1850 Pemerintah mulai bimbang. Apalagi setelah kaum liberal mendapatkan kemenangan politik di Parlemen (*Staten Generaal*). Parlemen memiliki peranan lebih besar dalam urusan tanah jajahan. Sesuai dengan asas liberalisme, maka kaum liberal menuntut adanya perubahan dan pembaruan. Peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dikurangi, sebaliknya perlu diberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pelindung warga, mengatur tegaknya hukum, dan membangun sarana prasarana agar semua aktivitas masyarakat berjalan lancar.

Kaum liberal menuntut pelaksanaan Tanam Paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal tersebut didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860 yakni buku Max Havelaar tulisan Edward Douwes Dekker dengan nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul *Suiker Contractor* (Kontrak-kontrak Gula) tulisan Frans van de Pute. Kedua buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan Tanam Paksa. Penolakan terhadap Tanam Paksa sudah menjadi pendapat umum. Oleh karena itu, secara berangsur-angsur Tanam Paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Hal ini juga didorong oleh isi kesepakatan di dalam Traktat Sumatera yang ditandatangani tahun 1871. Di dalam Traktat Sumatera itu antara lain dijelaskan bahwa Belanda diberi kebebasan untuk meluaskan daerahnya sampai ke Aceh. Tetapi sebagai imbangannya Inggris meminta kepada Belanda agar menerapkan ekonomi liberal agar pihak swasta termasuk Inggris dapat menanamkan modalnya di tanah jajahan Belanda di Hindia.

Penetapan pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal memberikan peluang pihak swasta untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

- 1) Tahun 1864 dikeluarkan Undang-undang Perbendaharaan Negara (*Comptabiliet Wet*). Berdasarkan Undang-undang ini setiap anggaran belanja Hindia Belanda harus diketahui dan disahkan oleh Parlemen.
- 2) Undang-undang Gula (*Suiker Wet*). Undang-undang ini antara lain mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta.
- 3) Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*) pada tahun 1870. Undang-Undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Di dalam undang-undang itu ditegaskan, antara lain:
 - a) Tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tanah milik penduduk pribumi berupa persawahan, kebun, ladang dan sebagainya. Kedua, tanah-tanah hutan, pegunungan dan lainnya yang tidak termasuk tanah penduduk pribumi dinyatakan sebagai tanah pemerintah.
 - b) Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah.
 - c) Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat disewa selama lima tahun, ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Sewa-menyewa tanah ini harus didaftarkan kepada pemerintah.

Sejak dikeluarkan UU Agraria itu, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Oleh karena itu, mulailah era imperialisme modern. Berkembanglah kapitalisme di Hindia Belanda. Tanah jajahan berfungsi sebagai: (1) tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa, dan tempat penanaman

modal asing, (2) tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa, (3) penyedia tenaga kerja yang murah.

Usaha perkebunan di Hindia Belanda semakin berkembang. Beberapa jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan misalnya tebu, tembakau, kopi, teh, kina, kelapa sawit, dan karet. Hasil barang tambang juga meningkat. Industri ekspor terus berkembang pesat seiring dengan permintaan dari pasaran dunia yang semakin meningkat.

Untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi, diperlukan sarana dan prasarana, misalnya irigasi, jalan raya, jembatan-jembatan, dan jalan kereta api. Hal ini semua dimaksudkan untuk membantu kelancaran pengangkutan hasil-hasil perusahaan perkebunan dari daerah pedalaman ke daerah pantai atau pelabuhan yang akan diteruskan ke dunia luar. Pada tahun 1873 dibangun serangkaian jalan kereta api. Jalan-jalan kereta api yang pertama dibangun adalah antara Semarang dan Yogyakarta, kemudian antara Batavia dan Bogor, dan antara Surabaya dan Malang. Pembangunan jalan kereta api juga dilakukan di Sumatera pada akhir abad ke-19. Tahun 1883 Maskapai Tembakau Deli telah memprakarsai pembangunan jalan kereta api. Pembangunan jalan kereta api ini direncanakan untuk daerah-daerah yang telah dikuasai dan yang akan dikuasai, misalnya Aceh. Oleh karena itu, pembangunan jalan kereta api di Sumatra ini, juga berdasarkan pertimbangan politik dan militer. Jalur kereta api juga dibangun untuk kepentingan pertambangan, seperti di daerah pertambangan batu bara di Sumatra Barat.

Di samping angkutan darat, angkutan laut juga mengalami peningkatan. Tahun 1872 dibangun Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia, Pelabuhan Belawan di Sumatra Timur, dan Pelabuhan *Emmahaven* (Teluk Bayur) di Padang. Jalur laut ini semakin ramai dan efisien terutama setelah adanya pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869.

Bagi rakyat Bumiputera pelaksanaan usaha swasta tetap membawa penderitaan. Pertanian rakyat semakin merosot. Pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan seperti pembangunan jalan raya, jembatan, jalan kereta api, saluran irigasi, benteng-benteng dan sebagainya. Di samping melakukan kerja paksa, rakyat masih harus membayar pajak, sementara hasil-hasil pertanian rakyat banyak yang menurun. Kerajinan-kerajinan rakyat mengalami kemunduran karena terdesak oleh alat-alat yang lebih maju. Alat transportasi tradisional, seperti dokar, gerobak juga semakin terpinggirkan. Dengan demikian rakyat tetap hidup menderita.

D. **METODE PEMBELAJARAN**

Model : *Group Resume*

Pendekatan : *Scientific*, dengan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan

E. **MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN**

1) Media Pembelajaran: buku, *power point*, hasil diskusi, ilustrasi/gambarpendukung, atlas, hand out materi.

2) Alat pendukung pembelajaran: papan tulis, spidol/boardmarker.

3) Sumber belajar/daftar pustaka:

a. Buku Pokok Pembelajaran:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Sejarah Indonesia*. SMA/MA SMK/MAK, Kelas XI, Semester I. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- b. Buku-buku Sejarah dan artikel sejarah yang relevan:
- Olso, Steven. 2006. *Mapping Human History*. Terjemahan. Jakarta: Serambi.
 - Ricklefs, M.C. 2001. *A History of Modern Indonesia circa 1200. Third Edition*. Houndmills: Palgrave.

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

| Tahap | KEGIATAN BELAJAR | Alokasi waktu |
|----------------------|--|---------------|
| Pendahuluan | <ul style="list-style-type: none"> • Guru membuka pertemuan dengan salam. • Peserta didik bersama guru berdoa. • Mengabsensi Peserta didik. • Mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk memulai proses KBM. • Mereview kembali pembahasan pada pertemuan sebelumnya sebagai langkah awal untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya . | 10 menit |
| Kegiatan Inti | <p>(mengamati)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru menampilkan gambar atau ilustrasi yang langsung berkaitan dengan materi mengenai penjajahan Pemerintah Hindia Belanda untuk memancing keterlibatan peserta didik • Guru memberikan instruksi kepada peserta didik untuk mengelompok menjadi tiga hingga tujuh kelompok sesuai dengan tema yang telah ditentukan. • Peserta didik duduk secara berkelompok sesuai dengan posisi tempat duduk. • Guru kemudian membagikan hand-out berisi materi terkait penjajahan Pemerintah Hindia Belanda sebagai panduan dalam diskusi • Peserta didik menyiapkan buku, mencari materi, dan melakukan pengamatan terhadap peta-peta terkait materi. (diperbolehkan <i>browsing</i> di internet) <p>(menanya)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap kelompok mendapatkan tugas melalui diskusi tentang penjajahan Pemerintah Hindia Belanda melalui studi pustaka, eksplorasi internet, berdiskusi dan menjawab permasalahan-permasalahan berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Jalan Tengah 2. Dampak dari pelaksanaan kebijakan Jalan Tengah oleh gubernur jenderal Van der Capellen 3. Lahirnya sistem Tanam Paksa (<i>Cultuurstelsel</i>) 4. Ketentuan terkait sistem Tanam Paksa 5. Pelaksanaan sistem Tanam Paksa 6. Lahirnya sistem Usaha Swasta 7. Pelaksanaan dan dampak dari sistem Usaha | 65 menit |

| | | |
|---------|---|---------|
| | <p>Swasta.</p> <p>(menalar)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap anggota kelompok terlibat secara aktif dalam mendeskripsikan atau memecahkan permasalahan-permasalahan di atas • Semua anggota kelompok mencatat hasil diskusi <p>(mencoba)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masing-masing kelompok (dengan diwakili dua orang) mempresentasikan di depan kelas mengenai hasil diskusinya terkait materi yang dibahas oleh kelompoknya, kelompok lain diberi kesempatan untuk menganggapi atau bertanya <p>Karakter yang dikembangkan : Bersyukur, Jujur, Tanggung Jawab, Rasa ingin tahu, Kerjasama.</p> | |
| Penutup | <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik menyimpulkan materi yang didapat dari pembelajaran yang telah selesai dibahas pada hari itu • Mengerjakan tugas mandiri sebagai pekerjaan rumah sebagai refleksi dari materi yang telah dibahas (Tugas terlampir) • Pembelajaran pada hari ini diselesaikan dengan doa penutup. | 5 menit |

G. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR

1. Penilaian Non Tes

a. Penilaian Sikap Spiritual dan Sosial

Penilaian Sikap Spiritual

Nama Peserta Didik :

Kelas :

Tanggal Pengamatan :

Materi Pokok :

| No | Aspek Pengamatan | Skor | | | |
|-------------|---|------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu | | | | |
| 2 | Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan | | | | |
| 3 | Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat/presentasi | | | | |
| 4 | Mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan | | | | |
| 5 | Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat mempelajari ilmu pengetahuan | | | | |
| Jumlah Skor | | | | | |

Petunjuk Penskoran :

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Skor diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 4 = \text{skor akhir}$$

Contoh :

Skor diperoleh 14, skor maksimal 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor akhir :

$$\frac{14}{20} \times 4 = 2,8$$

Sesuai Permendikbud No. 81A Tahun 2013 peserta didik memperoleh nilai adalah:

Sangat Baik : apabila memperoleh skor : $3,33 < \text{skor} \leq 4,00$

Baik : apabila memperoleh skor : $2,33 < \text{skor} \leq 3,33$

Cukup : apabila memperoleh skor : $1,33 < \text{skor} \leq 2,33$

Kurang : apabila memperoleh skor : skor $\leq 1,33$

Penilaian Sikap Jujur

Nama Peserta Didik :
Kelas :
Tanggal Pengamatan :
Materi Pokok :

| No | Aspek Pengamatan | Skor | | | |
|-------------|---|------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tidak menyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan/tugas | | | | |
| 2 | Tidak melakukan plagiat (mengambil/menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber) dalam mengerjakan setiap tugas | | | | |
| 3 | Mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa adanya | | | | |
| 4 | Melaporkan data atau informasi apa adanya | | | | |
| 5 | Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki | | | | |
| Jumlah Skor | | | | | |

Petunjuk Penskoran :

Lihat petunjuk penskoran pada pedoman observasi sikap spiritual

Penilaian Sikap Bertanggung Jawab

Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap tanggung jawab yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik :
 Kelas :
 Tanggal Pengamatan :
 Materi Pokok :

| No | Aspek Pengamatan | Skor | | | |
|-------------|--|------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Melaksanakan tugas individu dengan baik | | | | |
| 2 | Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan | | | | |
| 3 | Tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat | | | | |
| 4 | Mengembalikan barang yang dipinjam | | | | |
| 5 | Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan | | | | |
| Jumlah Skor | | | | | |

Petunjuk Penskoran

Lihat petunjuk penskoran pada pedoman observasi sikap spiritual

Penilaian Pengetahuan dan Keterampilan

| No | Nama Siswa | Aspek yang Dinilai | | | | | | Jumlah nilai |
|----|------------|--------------------|---|---|---|---|---|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |

Aspek yang Dinilai Meliputi: 1. Keaktifan menggali sumber.

2. Kemampuan bekerjasama.

3. Keaktifan bertanya

4. Akurasi pertanyaan.

5. Kemampuan memberikan kritik dan saran.

6. Kemampuan menanggapi pertanyaan.

Catatan : Skala Penilaian 1-4

4 : Sangat Aktif.

3 : Aktif

2 : Kurang Aktif

1 : Tidak aktif.

Kriteria Penilaian : 21-24 : A

17-20 : B

12-16 : C

6-11 : D

Penilaian

1. Analisislah mengenai kegagalan kebijakan Jalan Tengah!

2. Jelaskan mengenai sistem Tanam Paksa dan bagaimanakah dampaknya!

3. Analisislah mengenai dampak dari pelaksanaan sistem usaha Swasta!

Penskoran

Masing-masing soal skor bergerak 1 - 10.

Dengan kriteria: jawabansangat lengkap 9 - 10
Jawaban lengkap 7 - 8
Jawabancukup lengkap 5 - 6
Jawabankurang lengkap 3 - 4
Jawabantidak lengkap 1 - 2

Rumus penilaian : $\frac{\text{jumlah skor}}{\text{skor maksimal}} \times 100$

Apabila semua soal dijawab benar, maka nilai yang diperoleh adalah

$$\frac{40}{40} \times 100 = 100:$$

Format penilaian

| Nama Siswa | Nomor soal, bobot skor masing-masing soal dan nilai akhir | | | Nilai akhir (jumlah skor dibagi 30 dikalikan 100) |
|------------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dst | | | | |